



Jogja Kaji

Skema Perlindungan Sosial KMS

JOGJA, ANTARA--Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan kajian terkait perbaikan skema pelaksanaan program jaminan perlindungan sosial untuk warga miskin yang selama ini diberikan melalui Kartu Menuju Sehat.

"Hampir semua jaminan perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin penerima Kartu Menuju Sehat (KMS) sudah bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kajian untuk perbaikan skema program agar lebih tepat," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Selasa.

Jaminan perlindungan sosial yang diterima oleh warga miskin pemegang KMS di antaranya adalah jaminan kesehatan dan pendidikan. Saat ini, seluruh warga Kota Yogyakarta sudah dapat mengakses

layanan kesehatan apabila memiliki KTP Kota Yogyakarta atau melalui jaminan kesehatan nasional (JKN).

Sedangkan kuota siswa KMS saat penerimaan siswa baru dimungkinkan tidak lagi berlaku karena penerimaan siswa baru akan didasarkan pada jarak rumah ke sekolah bukan lagi pada nilai ujian.

"Oleh karena itu, perlu dipikirkan skema perlindungan sosial lain agar warga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah tersebut tetap mendapat perhatian yang tepat," katanya.

Ini memastikan, Pemerintah Kota Yogyakarta tetap akan memperhatikan warga miskin dengan memberikan program pemberdayaan sehingga warga tersebut tidak lagi masuk dalam kategori warga miskin.

"Seperti pemberian santuan kematian untuk warga penerima KMS

masih bisa dilakukan melalui mekanisme lain. Asalkan warga tersebut masuk dalam kategori penerima bantuan," katanya.

Pada tahun ini, jumlah warga miskin penerima KMS ditetapkan sebanyak 17.253 kepala keluarga atau berkurang sekitar 7,49 persen dibanding penerima tahun lalu sebanyak 18.651 kepala keluarga atau berkurang 8,5 persen jika dihitung berdasarkan jumlah jiwa penerima KMS tahun lalu.

Penerima KMS dibedakan menjadi tiga kategori yaitu fakir miskin, miskin dan rentan miskin.

"Warga yang benar-benar bisa diberdayakan adalah penerima KMS kategori miskin dan rentan miskin. Untuk fakir miskin memang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah karena tidak jarang mereka sudah lanjut usia," katanya.

Pada 2017, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta mencapai 7,64 persen atau turun 0,36 persen dibanding 2016 dan diharapkan terus turun hingga mencapai 7,35 persen pada 2019.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Bejo Suwarno mengatakan, sudah sekitar 50 persen KMS terdistribusi dan diharapkan rampung pada akhir Februari. "Kami juga menyusun kriteria baru untuk pendataan KMS. Salah satunya pada aspek pendapatan. Akan ada kenaikan nilai pendapatan dari Rp300.000 per anggota keluarga per bulan menjadi Rp 400.000 per anggota keluarga per bulan," katanya.

Bejo mengatakan, akan melakukan konsultasi ke DPRD Kota Yogyakarta terkait parameter baru sebelum menetapkannya.(ant)

Instansi
1. <u>Din. Sosial</u>
2.
3.
4.
5.

Netral

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005